

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu tentang kebijakan atau peraturan merupakan isu yang akan selalu muncul dalam sebuah pemberitaan. Pemberitaan mengenai kebijakan sejatinya selalu mendapat ruang karena bersifat penting untuk disampaikan dan diketahui masyarakat luas. Pemberitaan tentang kebijakan sangat berperan dalam mensosialisasikan guna segera dapat dipelajari dan diimplementasikan masyarakat serta memperoleh manfaatnya. Berita tentang kebijakan seakan menjadi berita wajib pada sebuah halaman surat kabar, baik di media cetak, media elektronik, maupun media online (Internet) karena penempatannya yang hampir selalu muncul pada Headline berita.

Sebagaimana menurut Alex Sobur, dalam bukunya yang berjudul Analisis Teks Media, setiap peristiwa yang dapat menarik minat pembaca, selalu dijadikan *headline* atau diletakan pada halaman muka surat kabar. Hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa pembaca pada umumnya ketika hendak membeli surat kabar, hal pertama yang mereka lihat adalah *Headline* berita pada cover surat kabar. Begitu juga dengan media online, ketika pembaca memasukan kata kunci peristiwa, mereka akan langsung mendapatkan berbagai judul yang menyangkut peristiwa tersebut dari berbagai alamat media online. hal ini sejalan dengan pendapat Rivers dan Mathews dalam (Sobur, 2018) mereka menyatakan bahwa sekitar 98% dari semua pembaca surat kabar membaca berita yang terdapat di cover surat kabar (Sobur, 2018).

Namun dalam prosesnya sebuah kebijakan atau peraturan tidak selamanya langsung mudah diterima oleh masyarakat. Kebijakan seperti perpajakan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan upah minimum dan kebijakan lain yang menyangkut hajat orang banyak khususnya masyarakat menengah ke bawah sering kali mendapat sorotan. Pada setiap masanya, kenaikan harga BBM hampir selalu berujung diprotes pemilik jasa angkutan umum. Pada setiap tahunnya pekerja buruh akan selalu berunjuk rasa dengan tuntutan yang sama kenaikan upah. Hal ini seakan membuat pemberitaan tentang kebijakan atau peraturan akan selalu menjadi isu yang muncul.

Lain cerita dengan isu permendikbud no 30 tahun 2021 yang menjadi polemik saat penelitian ini dimulai. Tidak hanya masyarakat menengah bawah yang dirugikan, tetapi semua mahasiswa/i di seluruh perguruan tinggi di Indonesia akan terdampak peraturan tersebut. Pasalnya, Permendikbud no 30 atau Permen PPKS ini dinilai tidak sesuai dengan kaidah dasar hukum negara Indonesia. Permen PPKS dibuat sebagai payung hukum dan respon atas kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi di perguruan tinggi. Namun dalam Permen PPKS tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan dasar hukum bahkan dianggap melegalkan zinah di perguruan tinggi. Seperti pada prasa “tanpa persetujuan korban” pada salah satu butir Permen PPKS tersebut sehingga menuai beragam tanggapan dan penolakan seperti ormas keagamaan secepatnya mereka menolak peraturan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan agama.

Media massa dalam menyampaikan informasi selalu memiliki “gaya” tersendiri dalam menjelaskan atau memaparkan suatu peristiwa, informasi atau

berita dengan menggunakan “bahasanya” sendiri. Bahasa yang dimaksudkan adalah bagaimana media massa dalam melihat suatu peristiwa. Dalam melihat suatu peristiwa, media massa selalu melakukan konstruksi realitas. Sebagaimana menurut Alex Sobur (2018) dalam bukunya Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, menuturkan bahwa pada dasarnya, pekerjaan media massa adalah mengkonstruksikan realitas. Dimana isi media, adalah hasil para pekerja yang mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilih. Maksudnya adalah upaya menyusun beberapa peristiwa atau keadaan secara sistematis menjadi suatu yang bermakna (Sobur, 2018)

Seperti kebijakan peraturan ketenagakerjaan atau dikenal dengan Omnibus Law pada tahun 2019, yang menuai kritikan dan reaksi penolakan keras dari masyarakat, menjadi isu yang menarik untuk diangkat dalam sebuah pemberitaan. Peraturan tersebut mendapat penolakan lantaran dianggap tidak berpihak pada masyarakat seperti kau buruh. Omnibus Law dianggap berpihak pada pengusaha yang dikhawatirkan berdampak besar terhadap masyarakat menengah bawah.

Peraturan sendiri adalah sebuah norma hukum baik yang tertulis maupun tidak, diperuntukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan sosial. Menurut Ahmad Redi (2018) peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan secara baku dan ketat. Peraturan yang dibuat dan diterapkan sejatinya menjadi pedoman pokok pihak-pihak yang membuat, menerapkan serta yang tinggal dalam wilayah berlakunya peraturan tersebut.

Peraturan dibuat berdasarkan keadaan atas sebuah realitas di masyarakat atau kejadian untuk mereka jadikan dasar hukum agar merasa aman dalam kehidupannya (Redi, 2017).

Namun berbeda dengan Permendikbud no 30 tahun 2021/PPKS ini, alih-alih membuat masyarakat merasa aman, dengan adanya peraturan tersebut malah membuat mereka merasa terancam dan dianggap berbahaya karena cakupan lingkungannya berada di perguruan tinggi. Peristiwa yang dimaknai sebagai pelecehan seksual dari dulu memang selalu ada dalam sebuah pemberitaan. Kendati demikian peraturan yang bertujuan memberi payung hukum dalam kasus tersebut akan dimaknai berbeda tergantung dari seberapa besar berita tersebut mampu mengundang simpati banyak orang dan bagaimana media dalam menyusun beberapa peristiwa atau keadaan secara sistematis menjadi suatu yang bermakna. Namun pada isu Permendikbud no 30 tahun 2021 ini, dari beberapa butir frasa peraturan tersebut publik memakainya sebagai pelegalan zina di lingkungan perguruan tinggi.



Gambar 1.1

Berita Polemik Permendikbud PPKS di Tito.id

Sumber: tirto.id

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII. "Kami menyayangkan adanya Permendikbud PPKS itu. Kami meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidaknya-tidaknya mengevaluasi atau merevisi peraturan tersebut," kata Amirsyah kepada reporter Tirto, Kamis (11/11)... (Setiawan, 2021).

Kemudian media Republika.com peneliti pilih sebagai pembanding dari media atas karena Republika.com selama ini dinilai sebagai media online dengan kaidah keagamaan yang melekat pada media online tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai postingan beritanya jika isu tersebut menyangkut agama, media Republika.com tidak mau ketinggalan untuk mempostingnya.



Gambar 1.2

Berita Polemik Permendikbud PPKS di Republika.co.id

Sumber: republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII telah selesai dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta pada 9-11 November 2021. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari ijtima ulama bertema 'Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa' ini meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudistek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan, berkenaan dengan Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021, ijtima ulama menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, MUI mengapresiasi niat baik dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi... (Ichsan, 2021).

Dalam sebuah pemberitaan, media yang memproduksi berita pada prosesnya tidak akan lepas dari yang namanya Framing. Menurut Nugroho. dkk, dalam (Sobur, 2018), Framing adalah suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis cerita, dimana perspektif tersebut pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Kemudian dalam menganalisis berita tersebut, penelitian menggunakan teori analisis *Framing* model Pan dan Kosicki. Model teori ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi, dimana *frame* sendiri merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu, ke dalam teks secara keseluruhan (Sobur, 2018).

Pada model teori analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ini, dalam melihat hubungan pusat organisasi ide tersebut, terdapat empat unsur yang menghubungkannya yaitu :

1. Sintaksis (yang berkaitan dengan cara penyusunan fakta)
2. Skrip (yang berhubungan cara wartawan mengisahkan peristiwa)
3. Tematik (cara wartawan mengungkapkan fakta)
4. Retoris (cara wartawan menekankan fakta).

Dalam pembedaan pemberitaan terkait isu permendikbud PPKS di Media Online *tirto.id* dan *republika.co.id*, sebagai bahan rujukan penelitian ini relevan dengan penelitian yang ditulis Hedo, D. Dkk (2021) tentang Pengaruh Aspek Sosial Budaya Terhadap Sikap Pelecehan Seksual. Dimana hasil dari penelitian jurnal tersebut menyimpulkan bahwa bahwa usia, pendidikan, dan budaya berpengaruh signifikan terhadap sikap pelecehan seksual, sedangkan pekerjaan tidak berpengaruh terhadap sikap pelecehan seksual. Selain itu, aspek lingkungan juga sangat mempengaruhi seperti sosio kultur yang terdapat dalam lingkungan masyarakat di suatu wilayah tertentu (Dian Jayantari Putri K Hedo, 2021).

Kemudian ada juga dari jurnal penelitian oleh Suryani dan Setiawan (2022) tentang Analisis *Framing* berita, Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Pada Media Online *Suara.Com* Dan *Tribun News*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penulisan berita terkait kasus pelecehan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada media *Suara.com* dan *Tribun News* terdapat beberapa perbedaan serta

persamaan dalam pengemasan terhadap penulisan beritanya mengenai kasus pelecehan di KPI (Lilis Lisda Suryani, 2022).

Kemudian dari kedua penelitian yang telah diuraikan diatas sebagai bahan rujukan, sedikitnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Seperti perbedaan teori yang digunakan, penelitian yang sedang dilakukan menggunakan teori analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan teori analisis sejenis dengan model yang beda. Sedangkan persamaannya yakni sama-sama menganalisis tentang fenomena pelecehan seksual. kemudian persamaan lain dalam penelitian ini juga terdapat pada media massa yang digunakan yakni media online.

Kemudian alasan peneliti memilih portal berita online Tirto, karena dalam berita yang dimuat portal tersebut, terdapat lima judul berita utama yang mengedepankan fakta dan beragam sudut pandang. Seperti judul berita *Ijtima Ulama MUI Minta Nadiem Cabut/Revisi Permendikbud PPKS*, yang peneliti akan analisis dan judul lainnya. Kemudian judul lainnya yakni *Polemik Permen PPKS saat Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Marak, Link Download Isi Permendikbud No 30 Soal PPKS & Kekerasan Seksual, Nadiem Jawab Persepsi Miring soal Permendikbud Kekerasan Seksual dan Penyintas KS Desak Nadiem Awasi Implementasi Permendikbud 30/2021*. Meski dalam pengangkatannya cenderung sedikit lambat dari media online lain.

Namun dibalik keterlambatan postingan berita tersebut, Tirto menyajikan berita dengan lengkap dan beragam sudut pandang dalam setiap beritanya.

Sedangkan portal berita Republika sengaja peneliti pilih sebagai pembanding, lantaran portal tersebut diketahui condong berkiblat pada media khazanah sehingga hal yang membuat bersinggungan dengan agama Portal Republika akan menyorotinya dengan seksama.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana media online dalam membingkai isu Permendikbud no 30 tahun 2021 dengan judul **Analisis Framing Berita Permendikbud No 30 Tahun 2021 Di Media Online**

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media online tirto.id dan republika.co.id membingkai pemberitaan isu Permendikbud no 30 tahun 2021 dilihat dengan teori Analisis *Framing* model Pan dan Kosicki ?

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberitaan isu Permendikbud no 30 tahun 2021 di tirto.id dan republika.co.id dilihat dari Struktur Sintaksis (cara wartawan menyusun fakta) ?
2. Bagaimana Pemberitaan isu Permendikbud no 30 tahun 2021 di tirto.id dan republika.co.id dilihat dari Struktur Skrip (cara wartawan mengisahkan fakta) ?

3. Bagaimana Pemberitaan isu Permendikbud no 30 tahun 2021 di tirto.id dan republika.co.id dilihat dari Struktur Tematik (cara wartawan mengungkapkan fakta) ?
4. Bagaimana Pemberitaan isu Permendikbud no 30 tahun 2021 di tirto.id dan republika.co.id dilihat dari Struktur Retoris (cara wartawan menekankan fakta) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemberitaan isu Permendikbud no 30 tahun 2021 di tirto.id dan republika.co.id dilihat dari Struktur Sintaksis (cara wartawan menyusun fakta).
2. Untuk menjelaskan pemberitaan isu Permendikbud no 30 tahun 2021 di tirto.id dan republika.co.id dilihat dari Struktur Skrip (cara wartawan mengisahkan fakta).
3. Untuk Menjelaskan Pemberitaan isu Permendikbud no 30 tahun 2021 di tirto.id dan republika.co.id dilihat dari Struktur Tematik (cara wartawan mengungkapkan fakta).
4. Untuk Menjelaskan pemberitaan isu Permendikbud no 30 tahun 2021 di tirto.id dan republika.co.id dilihat dari Struktur Retoris (cara wartawan menekankan fakta).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan kajian Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Kosicki dalam membedah suatu isu yang dibingkai karena menimbulkan polemik pro dan kontra dari masyarakat khususnya mahasiswa saat menyikapi aturan di perguruan tinggi.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan data oleh media yang dijadikan objek penelitian yakni Tirto.id dan Republika.co.id dalam melakukan evaluasi dari berita yang telah mereka publikasikan.

1.4.3 Manfaat Secara Kontribusi Penelitian Selanjutnya

Kajian Analisis Framing ini, diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk penelitian selanjutnya, dan menjadi referensi tambahan pada penelitian sejenis yang hendak menganalisis bagaimana cara membedah Framing isu Kebijakan peraturan yang dilakukan media online.